

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus: Perkara Nomor 30/Pid.Sus-Anak/ PN. Jkt. Sel.)**

**Supriyadi**

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejak semula ditujukan sebagai upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana peringanan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum pidananya yang dilakukan pengadilan dalam Putusan No 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel; *judex facti*; Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PT-DKI, dan *judex juris* dalam Putusan Nomor 769K/Pid.Sus/2017.

Metode penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis* serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan datanya dengan studi dokumen kemudian menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asas-asas dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sepantasnya, peringanan pidana terhadap Anak pada hukum pidana telah dilakukan pengaturannya dalam UU No.35 Tahun 2014 (Pasal 59A; Pasal 64 ; Pasal 69A ) dan UU NO.11 Tahun 2012 (Pasal 2, 3,4,79 dan Pasal 81) ini sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena sudah secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan peringanan pidana dalam studi kasus di pengadilan sudah terbukti dengan vonis hakim dalam lingkungan peradilan pertama, tingkat banding maupun tingkat Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Anak, Peringanan Pidana.

**THE LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACT, SEXUAL  
HARASSMENT AND SEXUAL FORNICATION, CHILD  
(The case of court is based on number : 30/Pid.Sus-Anak/ PN. Jkt.  
Sel.)**

**Supriyadi**

**Abstract**

*Law No. 35/2014 on Child Protection is initially intended to protect children and to ensure their safety by providing security for their rights. Nevertheless, sexual harassment and sexual fornication toward children often occurs and indicates its escalation even though it is regarded as a felony. Therefore, the problems which arose in the research were as follows: how about the regulation what give minus penal on sexual harassment and sexual fornication according to the criminal law in Indonesia, how about the enforcement of criminal law in judex facti in the case of sexual harassment and sexual fornication toward children under the Verdict No. 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel., in conjunction with the Verdict No. 19/Pid.Sus.Anak/2016/PT-DKI, and how about the enforcement of criminal law in judex juris under the Verdict No. 769K/Pid.Sus/2017..*

*The research used descriptive analytic method with analytic and legal provision approaches by analyzing the case No. 769K/Pid.Sus/2017. The source of data was secondary data which comprised primary, secondary, and tertiary legal materials. They were gathered by conducting documentary study and analyzed qualitatively by selecting relevant theories, principles, norms, doctrines, and articles in legal provisions and correlated them with the problems of the research.*

*The enforcement of criminal law in judex facti under the Verdict No. 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel, in conjunction with the Verdict No. 19/Pid.Sus.Anak/2016/PT-DKI, is in line with law of criminal procedure; namely, the reading of accusation, examining witnesses, examining documents, examining defendants, indictment, advocacy, and verdict. Handing down a verdict is based on the authentication theory according to law negatively. The enforcement of criminal law in judex juris under the Verdict No. No. 769K/Pid.Sus/2017 is in line with law of criminal procedure.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Criminal Act, Sexual Harassment, Sexual Fornication, Child.*